

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan daerah adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari daerah agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab daerah untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusyadi, 2009 dalam Dharma dan Suadarna, 2014). Menurut Waluyajati dalam Christina dan Keprameni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Di Kabupaten Klaten sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat

berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Menurut data yang di dapat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang taat pajak PKB dan BBNKB di tahun 2013- 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1

Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten

| Tahun | Jumlah Kendaraan |
|--------------|-------------------------|
| 2013 | 379.052 |
| 2014 | 394.890 |
| 2015 | 420.511 |

Sumber: UP3AD Kab. Klaten

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan dari tahun 2013- 2015. Hal ini dikarenakan naiknya daya beli kendaraan bermotor.

Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada (Putri dan Jati, 2012).

Instansi yang menangani pembayaran PKB dan BBNKB adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui Kantor Bersama SAMSAT yang merupakan kerjasama 3 instansi terkait yaitu DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian RI, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Kantor Bersama SAMSAT Klaten merupakan tempat para wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat Klaten diukur dengan peredaran jumlah kendaraan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Menurut Damayanti dalam Dharma dan Suardana (2014), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB dan BBNKB di Kantor Samsat Klaten. Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Puspa Arum dalam Susilawati dan Budiarta (2013), menyatakan bahwa pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dalam bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Sanksi perpajakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Banyak petugas kepolisian yang tidak tegas menangani langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Klaten. Banyak wajib pajak yang membayar 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Klaten bisa

memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Kantor Bersama SAMSAT Klaten merupakan ujung tombak pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Klaten karena instansi inilah para Wajib Pajak kendaraan bermotor di Klaten melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga instansi ini seharusnya terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Christina dan Keprameni, 2012).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan sample yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR & BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KLATEN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan & biaya balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT klaten.
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT klaten.
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT klaten.
4. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT klaten.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten klaten.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten klaten.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten klaten.
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten klaten.

D. Manfaat

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk mengetahui peran pajak bagi daerah.

b. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Klaten

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Bersama SAMSAT Klaten guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak PKB dan BBNKB yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib pajak PKB dan BBNKB lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambahan wacana keilmuan, terutama dibidang perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.